



Tradisi Tiatiki dan Pemimpin Opini: Analisis Media Vernakular dalam Komunikasi, Pelestarian Lingkungan, dan Politik Lokal Papua

Nurul Hidayat^{1*}, Joko Utomo Hadibroto²

^{1,2} Universitas Pancasila, Indonesia

Alamat: Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

Korespondensi penulis: nurulhidayat@univpancasila.ac.id*

Abstract. *The Tiatiki tradition in Teluk Depapre, Papua, is not merely an ecological ritual but serves as a cultural communication medium that conveys social and political messages. This study aims to analyze Tiatiki as vernacular media representing environmental conservation while articulating the resistance of indigenous communities against development policies that potentially threaten their customary territories. The research employs a qualitative approach with vernacular discourse analysis methods. Primary data were sourced from a 22-minute-22-second documentary produced by the Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua (2020), analyzed through narrative transcription, identification of visual symbols, open coding, axial coding, and theoretical interpretation based on the Two-Step Flow theory and the concept of vernacular media. The findings reveal that the ritual prohibition symbolized by the “kayul larangan” is not merely a sign of marine closure for ecological purposes but also a political statement asserting indigenous territorial claims. Indigenous opinion leaders play a strategic role as cultural communicators and as drivers of subtle resistance against external interventions. These results affirm that local wisdom-based conservation in Papua is not solely ecological but also constitutes a political discourse arena projecting cultural identity and indigenous rights. This study contributes theoretically to cultural communication studies, particularly in analyzing vernacular media as instruments of local political resistance.*

Keywords: *Environmental Conservation; Opinion Leaders; Papuan Local Politics; Tiatiki Tradition; Vernacular Media*

Abstrak. Tradisi Tiatiki di Teluk Depapre, Papua, bukan hanya ritual ekologis, tetapi juga sarana komunikasi budaya yang memuat pesan sosial dan politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis Tiatiki sebagai media vernakular yang merepresentasikan pelestarian lingkungan sekaligus resistensi masyarakat adat terhadap kebijakan pembangunan yang berpotensi mengancam wilayah adat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana vernakular. Data utama bersumber dari video dokumenter berdurasi 22 menit 22 detik produksi Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua (2020), yang dianalisis melalui transkripsi narasi, identifikasi simbol visual, open coding, axial coding, dan interpretasi teoretis berbasis teori Two-Step Flow dan konsep media vernakular. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kayu larangan dalam Tiatiki bukan hanya simbol penutupan laut demi konservasi, tetapi juga pernyataan klaim politik masyarakat adat. Pemimpin opini adat berperan strategis sebagai penyampai pesan budaya sekaligus penggerak resistensi halus terhadap intervensi eksternal. Temuan ini mempertegas bahwa konservasi berbasis kearifan lokal di Papua tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga menjadi arena wacana politik yang memproyeksikan identitas budaya dan hak masyarakat adat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada studi komunikasi budaya, khususnya analisis media vernakular sebagai instrumen perlawanan politik lokal.

Kata kunci: Media Vernakular; Pelestarian Lingkungan; Pemimpin Opini; Politik Lokal Papua; Tradisi Tiatiki

1. LATAR BELAKANG

Pelestarian lingkungan saat ini menjadi isu global yang tidak hanya berdimensi ekologis, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan sosial, politik, dan budaya (Lestari et al., 2022). Di Indonesia, wilayah-wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi, seperti Papua, menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara upaya konservasi alam dan proyek

pembangunan yang berorientasi ekonomi, yang seringkali menimbulkan ketegangan sosial maupun politik (Agustina, 2023). Dalam konteks ini, komunikasi publik tidak hanya berlangsung melalui media arus utama, melainkan juga melalui vernacular media, yaitu media berbasis budaya lokal yang memanfaatkan simbol, narasi, dan praktik sosial untuk menyampaikan pesan tertentu (McCurdy, 2021; Lindholm & Björk, 2020).

Tradisi-tradisi adat di Papua, salah satunya adalah Tiatiki di Teluk Depapre, merupakan bentuk komunikasi vernakular yang bukan sekadar ritual ekologis, melainkan juga memuat pesan sosial dan politik yang kuat (Hanifa, S., & Wiryany, D., 2025). Praktik Tiatiki, yakni penutupan wilayah laut dalam periode tertentu untuk memulihkan ekosistem perikanan, mencerminkan hubungan erat masyarakat adat dengan alam, di mana laut dipandang tidak hanya sebagai sumber ekonomi tetapi juga sebagai entitas spiritual yang terhubung dengan identitas budaya masyarakat pesisir Papua (Lestari et al., 2022). Namun demikian, tradisi Tiatiki tidak berlangsung dalam ruang sosial yang netral, sebab dokumentasi visual menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai konservasi lokal dengan proyek pembangunan modern seperti rencana pembangunan pelabuhan di Teluk Depapre, yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan hilangnya hak atas wilayah adat mereka (Santoso et al., 2021).

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana wacana budaya melalui media vernakular bertransformasi menjadi wacana resistensi politik, di mana tradisi Tiatiki dijadikan arena negosiasi masyarakat adat dalam mempertahankan klaim kedaulatan wilayah sekaligus melawan kebijakan pembangunan yang dianggap mengancam keberlangsungan ekosistem dan identitas budaya mereka (Moreno & Otero, 2023). Dalam proses komunikasi budaya ini, peran pemimpin opini menjadi sangat penting, karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, melainkan juga sebagai aktor strategis yang membingkai narasi konservasi menjadi pesan politik yang sesuai dengan nilai-nilai komunitas (Zhao et al., 2021; Moreno & Otero, 2023). Hal ini sejalan dengan teori two-step flow of communication, yang menyatakan bahwa pemimpin opini memiliki posisi sentral dalam menyaring dan menafsirkan informasi sebelum diteruskan ke masyarakat luas (Zhao et al., 2021).

Konsep media vernakular menegaskan bahwa komunikasi berbasis simbol lokal, ritual, dan bahasa daerah memiliki kekuatan politik karena ia muncul dari pengalaman sehari-hari masyarakat yang sering terpinggirkan dalam diskursus arus utama (Lindholm & Björk, 2020; McCurdy, 2021). Tradisi Tiatiki, dengan segala simbol dan prosesi ritualnya, dapat dibaca sebagai bentuk komunikasi yang sarat makna politik, di mana masyarakat adat tidak hanya berusaha melestarikan ekosistem laut, tetapi juga mempertahankan klaim kedaulatan atas

wilayah adat mereka dari intervensi eksternal (Moreno & Otero, 2023). Ini sejalan dengan temuan Nurul Hidayat (2023), yang menegaskan bahwa wacana budaya sering menjadi medium resistensi halus terhadap kebijakan negara atau korporasi yang dianggap mengancam eksistensi masyarakat adat.

Peran pemimpin opini dalam konteks ini menjadi sangat strategis. Mereka tidak hanya menjadi figur ritual, tetapi juga komunikator kunci yang menerjemahkan nilai-nilai budaya ke dalam pesan politik yang lebih luas (Moreno & Otero, 2023; Zhao et al., 2021). Pemimpin adat dalam tradisi Tiatiki berfungsi sebagai filter sosial yang memadukan pesan konservasi lingkungan dengan klaim politik, sehingga pesan tersebut dapat diterima dan dipatuhi masyarakat secara kolektif (Rizqiani, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi vernakular bukan hanya persoalan budaya, melainkan juga sarana perjuangan politik yang efektif.

Meskipun terdapat banyak studi terkait komunikasi budaya, resistensi lokal, dan konservasi berbasis kearifan lokal (McCurdy, 2021; Lindholm & Björk, 2020; Putra et al., 2022), kajian yang secara spesifik menganalisis tradisi Tiatiki sebagai media vernakular dalam konteks komunikasi politik dan pelestarian lingkungan di Papua masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan aspek ekologis atau hukum adat, bukan pada dimensi komunikasi dan wacana yang muncul dalam praktik budaya ini (Ramadhania, 2024). Padahal, memahami tradisi seperti Tiatiki dalam perspektif komunikasi vernakular dapat mengungkap lapisan makna sosial dan politik yang selama ini tersembunyi di balik praktik budaya.

Hal ini menunjukkan urgensi penelitian yang tidak hanya memotret Tiatiki sebagai ritual ekologis, tetapi juga sebagai medium komunikasi budaya yang memuat pesan sosial dan politik. Pemahaman mendalam mengenai Tiatiki sebagai vernacular media dapat menjadi kontribusi signifikan bagi upaya pelestarian budaya sekaligus pengelolaan konflik pembangunan di Papua (Moreno & Otero, 2023). Penelitian ini berpotensi membuka wacana baru tentang bagaimana masyarakat adat memanfaatkan komunikasi berbasis budaya lokal sebagai strategi mempertahankan identitas, hak wilayah adat, sekaligus merespons kebijakan pembangunan yang tidak selalu berpihak kepada mereka (Hidayat, 2025).

Selain sebagai media pelestarian nilai-nilai budaya dan lingkungan, praktik tradisi Tiatiki juga menyimpan potensi sebagai bahan kajian ilmiah, khususnya melalui pendekatan analisis media vernakular, yang memadukan kajian simbol, narasi, serta konteks sosial politik (McCurdy, 2021). Analisis semacam ini penting dilakukan agar pemahaman mengenai ritual-ritual lokal tidak berhenti pada deskripsi kebiasaan masyarakat semata, melainkan juga mampu

mengungkap peran ritual tersebut sebagai strategi komunikasi yang sarat makna politik dan sosial (Hidayat, 2025). Hal ini relevan dengan perkembangan metodologi komunikasi kontemporer yang menekankan pentingnya pembacaan konteks sosial dalam menafsirkan makna simbolik yang muncul di ruang publik (Lindholm & Björk, 2020).

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi baru karena tidak hanya melihat Tiatiki sebagai ritual konservasi, melainkan juga sebagai vernacular media yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi wacana politik lokal serta menjadi arena resistensi terhadap kebijakan pembangunan yang dianggap mengancam identitas budaya masyarakat Papua (Suryawan, 2022). Penelitian ini memanfaatkan data audiovisual dokumenter sebagai sumber utama, yang dianalisis untuk mengidentifikasi simbol, narasi, serta representasi peran pemimpin opini dalam mengartikulasikan pesan politik dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan komunikasi budaya sekaligus memberikan perspektif baru mengenai bagaimana komunitas lokal memanfaatkan media vernakular sebagai instrumen strategis dalam dinamika sosial dan politik kontemporer (Zhao et al., 2021; Moreno & Otero, 2023).

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam memperluas kajian komunikasi vernakular di Indonesia, sekaligus memiliki manfaat praktis sebagai masukan bagi pembuat kebijakan agar lebih sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal dalam merancang pembangunan. Tradisi Tiatiki menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat adat menggunakan media vernakular untuk mengartikulasikan klaim politik dan menjaga keberlanjutan lingkungan, yang relevan untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Barron et al., 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Two-Step Flow of Communication

Model Two-Step Flow of Communication yang dikembangkan Katz dan Lazarsfeld (1955) menjelaskan bahwa penyebaran informasi tidak terjadi secara langsung dari media kepada masyarakat luas, melainkan melalui figur-figur kunci yang disebut pemimpin opini. Pemimpin opini bertindak sebagai filter, penerjemah, dan pembingkai pesan agar sesuai dengan nilai sosial dan budaya komunitas (Zhao et al., 2021). Dalam konteks masyarakat adat, pemimpin opini tidak hanya memiliki otoritas sosial, tetapi juga otoritas simbolik yang menentukan bagaimana makna budaya dan pesan politik diartikulasikan (Moreno & Otero, 2023). Hal ini terlihat dalam konteks tradisi Tiatiki di Papua, di mana pemimpin adat tidak hanya memimpin upacara ritual, tetapi juga memainkan peran penting dalam menyampaikan

pesan konservasi lingkungan sekaligus resistensi terhadap kebijakan pembangunan yang dianggap mengancam hak wilayah adat (Devinta et al., 2024).

Konsep ini menunjukkan bahwa teori two-step flow tidak hanya relevan di konteks komunikasi modern, tetapi juga sangat kontekstual dalam praktik komunikasi budaya tradisional. Pemimpin adat dalam Tiatiki berfungsi sebagai aktor strategis yang menggabungkan nilai spiritual, sosial, dan politik ke dalam pesan budaya, menjadikan mereka figur kunci dalam dinamika media vernakular di Papua. Dengan demikian, two-step flow menjadi kerangka penting untuk memahami bagaimana informasi dalam komunitas adat tidak hanya ditransmisikan, tetapi juga dibingkai sesuai kepentingan budaya dan politik lokal.

Wacana Vernakular dalam Konteks Kearifan Lokal

Konsep wacana vernakular menitikberatkan pada cara kelompok masyarakat lokal membangun wacana yang lahir dari pengalaman sehari-hari, berbeda dari wacana dominan yang sering dikuasai negara atau korporasi (Ono & Sloop, 1995; McCurdy, 2021). Wacana vernakular muncul melalui simbol, bahasa lokal, narasi, dan ritual yang menjadi saluran komunikasi komunitas untuk mempertahankan identitas sekaligus menyuarakan aspirasi mereka (Lindholm & Björk, 2020). Dalam konteks Papua, praktik seperti Tiatiki menjadi sarana di mana masyarakat adat tidak hanya mengekspresikan nilai budaya, tetapi juga memanfaatkan wacana lokal untuk mempertahankan klaim wilayah adat dan mengartikulasikan resistensi terhadap kebijakan pembangunan (Cantika et al., 2024).

Wacana vernakular memiliki kekuatan politis karena berakar pada pengalaman kolektif masyarakat, sekaligus menjadi sarana silent resistance terhadap intervensi eksternal (Moreno & Otero, 2023). Dalam Tiatiki, simbol seperti kayu larangan bukan hanya tanda larangan aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga pernyataan politik yang menyatakan klaim masyarakat adat atas wilayah laut mereka. Dengan demikian, wacana vernakular dalam tradisi Tiatiki berfungsi bukan hanya sebagai representasi budaya, melainkan juga sebagai media resistensi politik yang sangat kontekstual (McCurdy, 2021).

Media Vernakular sebagai Arena Resistensi Politik

Media vernakular bukan hanya sarana komunikasi budaya, tetapi juga berfungsi sebagai arena resistensi politik, terutama dalam konteks masyarakat adat yang menghadapi tekanan kebijakan pembangunan yang berpotensi mengancam ruang hidup mereka (McCurdy, 2021). Resistensi politik melalui media vernakular sering dilakukan secara simbolik melalui bahasa lokal, ritual, tanda visual, atau artefak budaya yang memiliki makna politik tertentu

(Lindholm & Björk, 2020). Fenomena ini dikenal sebagai silent resistance, yakni bentuk perlawanan yang tidak konfrontatif secara langsung, tetapi efektif dalam mempertahankan klaim sosial dan politik komunitas (Syaghani et al., 2025).

Dalam konteks Papua, tradisi Tiatiki menjadi contoh bagaimana vernacular media dijadikan alat resistensi politik. Kayu larangan, misalnya, bukan hanya penanda larangan aktivitas di laut, tetapi juga menjadi simbol klaim wilayah adat dan penolakan terhadap kebijakan pembangunan eksternal yang dianggap mengancam ekosistem laut serta identitas budaya masyarakat adat (Rahman et al., 2021; Moreno & Otero, 2023). Penelitian Putra et al. (2022) juga menunjukkan bahwa praktik penutupan wilayah laut di wilayah timur Indonesia sering dijadikan strategi politik masyarakat adat untuk mempertahankan hak-hak tradisional mereka. Dengan demikian, media vernakular dalam Tiatiki tidak hanya berperan melestarikan lingkungan, tetapi juga menjadi wacana perlawanan yang memproyeksikan kepentingan politik masyarakat adat Papua ke ruang publik.

Konservasi Berbasis Kearifan Lokal dan Identitas Budaya

Konservasi berbasis kearifan lokal menekankan peran pengetahuan tradisional masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, sekaligus menjadi bagian dari identitas budaya (Lestari et al., 2022). Di Papua, tradisi Tiatiki menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat pesisir mengintegrasikan konservasi ekologis dengan nilai-nilai budaya dan spiritual. Laut dalam Tiatiki bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga entitas spiritual yang dianggap sebagai “ibu” yang harus dijaga, mencerminkan keterkaitan antara ekologi, budaya, dan identitas sosial masyarakat adat (Allen, 2020; Utami & Raharjo, 2021).

Selain fungsi ekologis, konservasi berbasis kearifan lokal memiliki dimensi politik yang signifikan. Penelitian Rahman et al. (2021) menunjukkan bahwa penutupan wilayah laut oleh masyarakat adat tidak hanya bertujuan memulihkan ekosistem, tetapi juga menjadi klaim politik untuk mempertahankan wilayah adat dari intervensi eksternal. Dalam konteks Tiatiki, praktik kayu larangan berfungsi sebagai vernacular media, yaitu simbol visual yang menggabungkan pesan konservasi dengan klaim politik masyarakat adat (Priyanto & Susilo, 2023; Moreno & Otero, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa konservasi tidak hanya merupakan tindakan ekologis, tetapi juga bentuk komunikasi politik yang memperkuat identitas budaya dan hak masyarakat adat.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana vernakular. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami makna simbol, narasi, dan representasi budaya yang muncul dalam media dokumenter, serta keterkaitannya dengan dinamika sosial, budaya, dan politik masyarakat adat Papua. Fokus penelitian ini adalah tradisi Tiatiki sebagai praktik kearifan lokal yang tidak hanya memiliki dimensi ekologis, tetapi juga berfungsi sebagai wacana sosial dan politik di masyarakat pesisir Papua.

Teknik Pengumpulan Data dan Prosedur Analisis

Data utama penelitian ini bersumber dari video dokumenter berdurasi 22 menit 22 detik, produksi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Papua (2020), yang menampilkan visualisasi ritual adat Tiatiki, aktivitas masyarakat pesisir, dan pemandangan alam sekitar Teluk Depapre. Video ini tidak memuat wawancara langsung, melainkan berisi narasi lisan (voice over) yang menjelaskan konteks budaya dan adat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dokumen audiovisual, yaitu dengan menonton video dokumenter secara berulang untuk mencatat adegan penting, simbol budaya, dan narasi yang muncul. Selain itu, dilakukan studi pustaka untuk memperkaya kerangka analisis dan memperkuat interpretasi.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu transkripsi narasi video, identifikasi simbol dan elemen visual, open coding (pengkodean terbuka) untuk menemukan tema-tema penting seperti pelestarian lingkungan, nilai budaya, klaim wilayah adat, dan konflik pembangunan. Tahap berikutnya adalah axial coding (pengkodean aksial) untuk menemukan hubungan antar tema. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara teoretis dengan mengintegrasikan kerangka Two-Step Flow of Communication dan konsep wacana vernakular. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana tradisi Tiatiki direpresentasikan sebagai wacana budaya yang memiliki muatan politik serta resistensi terhadap kebijakan pembangunan.

Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui beberapa teknik. Pertama, dilakukan triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil analisis isi video dokumenter dengan literatur ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan, termasuk triangulasi sumber dan teori. Kedua, peneliti menerapkan prolonged engagement, yakni dengan menonton video dokumenter secara berulang dan mendalami literatur pendukung untuk memperoleh pemahaman mendalam

terhadap konteks sosial budaya masyarakat Papua. Ketiga, dilakukan peer debriefing (diskusi teman sejawat) untuk meminimalisir bias interpretasi dan memperkaya sudut pandang analisis. Keempat, hasil penelitian disusun dalam bentuk thick description agar pembaca dapat menangkap konteks budaya dan makna simbolik secara utuh. Selain itu, peneliti menyusun audit trail berupa catatan proses analisis untuk memastikan keterlacakan data. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan data audiovisual tanpa wawancara langsung dengan tokoh adat atau masyarakat, sehingga bersifat eksploratif. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai bagaimana tradisi Tiatiki direpresentasikan sebagai wacana budaya yang memiliki relevansi sosial dan politik dalam dinamika pembangunan di Papua.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Simbolik Tradisi Tiatiki

Analisis video dokumenter berdurasi 22 menit 22 detik produksi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Papua (2020) memperlihatkan bagaimana tradisi Tiatiki direpresentasikan melalui simbol-simbol visual yang sarat makna. Salah satu adegan menonjol adalah penancapan kayu larangan di tepi pantai oleh tokoh adat. Kayu larangan berfungsi sebagai tanda larangan memanfaatkan wilayah laut tertentu dalam waktu tertentu, yang bertujuan untuk memberi kesempatan biota laut berkembang biak. Adegan ini bukan hanya tindakan ekologis, tetapi juga menjadi simbol otoritas masyarakat adat atas wilayah mereka. Hal ini sejalan dengan konsep wacana vernakular yang menjelaskan bahwa simbol-simbol lokal seringkali digunakan sebagai media komunikasi yang menyampaikan pesan sosial, budaya, maupun politik (Ono & Sloop, 1995; Fairclough, 1995).

Penelitian Putra et al. (2022) mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa tanda larangan dalam masyarakat adat seringkali menjadi “bahasa visual” yang menegaskan klaim wilayah sekaligus sebagai pesan resistensi terhadap pihak luar. Namun, penelitian ini menambahkan konteks unik Papua, di mana visual kayu larangan bukan hanya tanda sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Sebagai ringkasan temuan visual dan interpretasi teoretis, berikut Tabel 1 yang memperlihatkan integrasi hasil analisis:

Tabel 1. Ringkasan Temuan Visual dan Interpretasi Teoretis

Temuan Visual/Narasi	Deskripsi	Interpretasi Teori
Kayu larangan ditancapkan di tepi pantai	Simbol fisik penutupan wilayah laut; bentuk tanda larangan memasuki area laut tertentu.	Wacana Vernakular: Kayu larangan menjadi wacana visual yang menegaskan klaim kedaulatan masyarakat adat atas wilayah laut (Ono & Sloop, 1995; Fairclough, 1995).
Pemimpin adat memimpin doa adat	Ritual adat penuh khidmat; doa diucapkan dalam bahasa lokal.	Two-Step Flow: Pemimpin opini berfungsi sebagai perantara nilai konservasi dan politik, membingkai pesan agar sesuai norma budaya (Katz & Lazarsfeld, 1955; Wiryanto, 2000).
Laut disebut sebagai “ibu yang memberi makan”	Narasi voice over menegaskan hubungan spiritual-ekologis masyarakat dengan laut.	Wacana Vernakular & Identitas Budaya: Laut bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi bagian identitas dan spiritualitas komunitas (Lestari, D. et al. (2022).
Narasi ancaman pembangunan pelabuhan	Voice over menyebut proyek pelabuhan yang menimbulkan kekhawatiran.	Resistensi Politik: Tiatiki menjadi arena resistensi terhadap pembangunan yang dianggap mengancam wilayah adat (Putra et al., 2022; Rahman et al., 2021).
Aktivitas masyarakat memancing	Visual kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir.	Konservasi Kearifan Lokal: Menunjukkan keterikatan hidup masyarakat pada laut dan pentingnya tradisi Tiatiki sebagai perlindungan ekologis (Rahman, N., Wibowo, D. S., & Kurniawan, F. (2021).

Narasi Spiritualitas dan Identitas Budaya

Selain representasi simbol, dokumenter juga menonjolkan narasi spiritual yang kuat. Voice over dalam dokumenter berulang kali menyebut laut sebagai “ibu yang memberi makan,” yang menunjukkan bahwa laut bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas spiritual masyarakat. Pemimpin adat yang memimpin doa di tepi laut memperkuat makna spiritual tradisi ini. Doa diucapkan dalam bahasa lokal, menandakan upaya menjaga kontinuitas nilai budaya sekaligus menjadi sarana edukasi generasi muda.

Hal ini sejalan dengan temuan Lestari, D. et al. (2022), yang menemukan bahwa masyarakat pesisir Papua memaknai laut sebagai entitas hidup yang terhubung dengan leluhur dan spiritualitas. Perspektif ini memperlihatkan bagaimana wacana vernakular berfungsi bukan hanya untuk pelestarian alam, tetapi juga sebagai penjaga identitas budaya. Penelitian Utami et al. (2020) juga mencatat bahwa penggunaan bahasa lokal dalam komunikasi lingkungan lebih efektif karena menyentuh rasa memiliki komunitas.

Tiatiki sebagai Wacana Resistensi Politik

Dokumenter merekam narasi yang mengindikasikan kekhawatiran masyarakat adat terhadap rencana pembangunan pelabuhan di Teluk Depapre. Musik latar menjadi lebih intens

ketika *voice over* menyebut pembangunan pelabuhan, memperkuat nuansa ancaman. Visual laut yang luas disorot panjang, seolah menjadi “ruang klaim” masyarakat adat terhadap wilayah adat mereka. Adegan ini memperlihatkan bahwa Tiatiki tidak hanya sebagai tradisi konservasi, tetapi juga sebagai wacana resistensi politik terhadap intervensi eksternal.

Hal ini mengonfirmasi penelitian Rahman et al. (2021), yang menemukan bahwa tradisi lokal sering menjadi bentuk penolakan terhadap pembangunan yang mengancam lingkungan. Namun, penelitian ini memperkaya diskursus dengan memperlihatkan bahwa di Papua, resistensi politik terwujud bukan melalui demonstrasi terbuka, melainkan melalui narasi budaya dan simbol-simbol adat seperti Tiatiki. Tradisi ini menjadi cara masyarakat adat menegaskan klaim kedaulatan wilayah mereka.

Peran Pemimpin Opini dalam Komunikasi Vernakular

Meskipun dokumenter tidak memuat wawancara langsung, pemimpin adat tampil dominan dalam visual sebagai figur yang memimpin prosesi, menancapkan kayu larangan, dan memimpin doa. Ini menunjukkan peran mereka sebagai pemimpin opini yang menerjemahkan wacana konservasi menjadi pesan yang dapat diterima masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Two-Step Flow of Communication (Katz & Lazarsfeld, 1955), yang menyatakan bahwa pemimpin opini berfungsi sebagai penyaring dan pembingkai pesan sebelum diteruskan ke khalayak.

Penelitian Priyanto, B., & Susilo, T. A. (2023) mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa pemimpin opini di komunitas adat bukan hanya penyampai pesan, tetapi juga penjaga identitas budaya. Dalam konteks Tiatiki, pemimpin adat berperan mengemas nilai konservasi dan klaim politik ke dalam wacana budaya agar diterima masyarakat. Tradisi Tiatiki menjadi bukti bagaimana pemimpin opini memanfaatkan wacana vernakular sebagai instrumen komunikasi sekaligus strategi negosiasi terhadap kebijakan pembangunan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Tiatiki berfungsi ganda: sebagai praktik konservasi berbasis kearifan lokal, sekaligus sebagai arena komunikasi politik masyarakat adat Papua. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana wacana vernakular yang dijalankan pemimpin opini berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mempertahankan hak atas wilayah adat dan menjaga kelestarian ekosistem laut di tengah tekanan pembangunan. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan memperlihatkan bahwa pelestarian budaya tidak dapat dipisahkan dari konteks politik lokal, sebab budaya bukan sekadar warisan, melainkan juga menjadi alat negosiasi dalam mempertahankan identitas dan kedaulatan komunitas adat. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan data

audiovisual tanpa wawancara langsung, sehingga interpretasi bersifat eksploratif. Penelitian lapangan di masa mendatang dengan wawancara langsung diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika komunikasi politik dalam tradisi Tiatiki.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Tiatiki bukan hanya praktik konservasi berbasis kearifan lokal, tetapi juga menjadi arena komunikasi sosial dan politik masyarakat adat Papua. Analisis video dokumenter memperlihatkan bahwa simbol kayu larangan, narasi spiritual laut sebagai “ibu,” serta peran pemimpin adat dalam ritual, menjadi wacana vernakular yang sarat makna ekologis, kultural, dan politis. Tradisi Tiatiki berfungsi sebagai instrumen resistensi halus terhadap intervensi pembangunan yang dianggap mengancam wilayah adat, sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat pesisir Papua.

Penelitian ini memperlihatkan bagaimana pemimpin opini memegang peran penting dalam menerjemahkan wacana konservasi ke dalam pesan budaya yang mudah diterima komunitas. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa pelestarian budaya tidak dapat dilepaskan dari konteks politik lokal, sebab budaya bukan sekadar warisan, tetapi juga menjadi alat negosiasi dan pertahanan hak masyarakat adat. Implikasi dari temuan ini mendorong pentingnya kebijakan pembangunan yang lebih sensitif terhadap wacana budaya masyarakat adat agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem dan pelestarian identitas budaya Papua. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan wawancara langsung dengan tokoh adat dan masyarakat untuk memperkaya pemahaman tentang dinamika komunikasi politik di balik tradisi Tiatiki.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, A. (2023). Marine Resources Management in Sorong Regency in Environmental Communication Perspective. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(7), 5807–5814. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i7.5716>
- Barron, P., Cord, L., Cuesta, J., Espinoza, S. A., Larson, G., & Woolcock, M. (2025). Social sustainability and the development process: what is it, why does it matter, and how can it be enhanced? *Oxford Development Studies*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/13600818.2025.2502971>
- Cantika, V. M., Hernawan, A. H., & Dewi, L. (2024). Pendidikan Masyarakat Adat dalam Kerangka Kurikulum Indonesia. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 10(1), 682–690. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i1.1600>

- Devinta, L., & Addiansyah, M. N. R. (2024). POLITIK PEMINGGIRAN MASYARAKAT ADAT DIBALIK PEMBANGUNAN IKN NUSANTARA. *Masyarakat Indonesia*, 50(2), 301–316. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8845>
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Hanifa, S., & Wiryany, D. (2025). Komunikasi Budaya Pada Masyarakat Pulau Arar Papua Barat Daya (Studi Kasus Komunikasi Budaya Sebagai Citra Budaya Masyarakat Kampung Arar). *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 9(1), 89–102. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v9i1.5847>
- Hidayat, N. (2025). Narasi Kebangsaan di Era Media Sosial: Relevansi Pancasila dalam Ekosistem Digital. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 105–118. <https://doi.org/10.36456/p.v5i1.10183>
- Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955). *Personal influence: The part played by people in the flow of mass communications*. Free Press.
- Lestari, D., Widodo, S., & Raharjo, T. (2022). Local wisdom and coastal conservation in Eastern Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 218, 106035. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106035>
- Lindholm, M., & Björk, S. (2020). Vernacular resistance and counter-discourses in digital publics. *New Media & Society*, 22(10), 1854–1872. <https://doi.org/10.1177/1461444819883851>
- McCurdy, P. (2021). Protest camps as vernacular media practices. *Communication, Culture & Critique*, 14(2), 213–230. <https://doi.org/10.1093/ccc/tcab003>
- Moreno, Á., & Otero, M. (2023). Influence of opinion leaders in environmental communication. *Environmental Communication*, 17(2), 204–221. <https://doi.org/10.1080/17524032.2022.2142428>
- Muhammad Syaghani, H., Ahmad, H., & Hidayat, N. (2025). Meningkatkan UMKM Melalui Pemasaran Digital (Brand Awareness) di Desa Pasireurih. *Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 74–84. <https://doi.org/10.47861/jipm-nalanda.v3i1.1560>
- Nur Rizky Ramadhania, N. H. (2024). Analysis of clean ocean campaign framing in Instagram account posts @pandulaut.id and @theoceancleanup. *International Journal of Environmental Communication (ENVICOMM)*, 2(1), 11–23. <https://doi.org/10.35814/envicomm.v2i1.6914>
- Nurul Hidayat, W. N. (2023). Media sosial sebagai social engineering untuk membentuk mindset masyarakat dalam penyelamatan lingkungan hidup. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(2), 954–965. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1975>
- Ono, K. A., & Sloop, J. M. (1995). The critique of vernacular discourse. *Communication Monographs*, 62(1), 19–46. <https://doi.org/10.1080/03637759509376346>

- Rizqiani, W., & Hidayat, N. (2024). Low Public Perspective on the Importance of a Sustainable Environment in The Environmental Journalism Polemic. *International Journal of Environmental Communication (ENVICOMM)*, 1(1), 32–40. <https://doi.org/10.35814/envicomm.v1i1.7874>
- Santoso, B., Fatimah, F., & Lukitawati, B. (2021). Komunikasi Antar Budaya Masyarakat Pedalaman Papua Melalui Model Komunikasi di Youtube Expedisi Segaris Episode 9. *Jurnal Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA*, 13(02), 46–53. <https://doi.org/10.33221/jikom1.v13i02.154>
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale University Press.
- Suryawan, I. N. (2022). MEMBANGUN KAMPUNG ADAT DAN JUGA MELAWAN INVESTASI: ARTIKULASI ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA, PAPUA. *Masyarakat Indonesia*, 48(1), 31–46. <https://doi.org/10.14203/jmi.v48i1.1179>
- Wiryanto, W. (2000). *Pengantar ilmu komunikasi*. PT Grasindo.
- Zhao, Y., Xie, B., Zhang, J., & Jiang, Y. (2021). Social influence and opinion leadership in digital media: A two-step flow perspective. *Telematics and Informatics*, 57, 101572. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101572>